

Pembangunan TPPAS Lulut Nambo Terlunta-lunta

CIBINONG (IM)- Proyek pembangunan tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor kini terlunta-lunta.

Proyek senilai Rp600 miliar yang rencananya tuntas dikerjakan pembangunannya di Bogor pada akhir Juli 2020 lalu sempat digeser. Namun, usai digeser hingga akhir Februari 2022, TPPAS Lulut Nambo hingga saat ini belum juga rampung.

Dari informasi yang di-himpun, progres pembangunan TPPAS Lulut Nambo hanya berkisar sekitar 40 persen. Tak banyak dilakukan kegiatan pembangunan di Bogor karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat bersama PT Jabar Bersih Lestari kehilangan investor.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menilai DLH Jawa Barat sebagai leading sektor tidak serius melaksanakan keinginan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,

yang didukung teknologi Jerman ingin membangun TPPAS terancang di Indonesia.

"Keinginan Kang Ridwan Kamil yang juga tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Barat, untuk membangun TPPAS terancang di Kabupaten Bogor belum juga terwujud di tahun keempat kepemimpinannya. Saya melihat DLH Jawa Barat tidak serius hingga proyek pembangunan TPPAS Lulut Nambo terlunta-lunta," ucap Asep Wahyuwijaya, kemarin.

Asep Wahyuwijaya pun meminta DLH Jawa Barat segera menuntaskan pembangunan TPPAS Lulut Nambo, paling lambat pada pertengahan 2023 mendatang.

"Proyek pembangunan TPPAS Lulut Nambo harus selesai sebelum periode kang Ridwan Kamil habis. Terkait pendanaan, mereka harus membangun kajian bisnis yang feasible hingga investor tak lagi mundur di tengah jalan," pintanya. ● gio

DPRD Kota Bogor Kecewa, Hasil LHP BPK RI tak Ditindaklanjuti

BOGOR (IM)- Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Inspektori Kota Bogor untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kota Bogor tahun anggaran 2021.

"Dalam rapat bersama inspektori pada Senin (18/7) lalu, disampaikan rekomendasi dan temuan dari BPK-RI dan harus disampaikan tindak lanjutnya paling lambat pada Selasa (19/7) kemarin. Rekomendasi ini sesuai dengan peraturan ketua BPK nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI," ungkap Jenal Mutaqin di gedung DPRD Kota Bogor kepada wartawan, Rabu (20/7).

Jenal Mutaqin melanjutkan, pada pasal 3 ayat 3 dinyatakan bahwa tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

"Perlu diketahui, Pemerintah Kota Bogor menerima rekomendasi LHP BPK-RI pada 20 Mei lalu, namun sayangnya hingga saat rapat digelar, masih terdapat tiga dinas yang belum menindaklanjuti

rekomendasi BPK," terang pria yang akrab disapa JM.

JM menjelaskan, tiga dinas tersebut di antaranya adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

"Kami sangat kecewa ada tiga dinas yang belum menyetorkan hasil temuan BPK. Ini harus menjadi atensi khusus agar tindak lanjut rekomendasi BPK, bukan sekedar surat intruksi Wali Kota kepada dinas masing-masing, tetapi disertai upaya penyelesaian atas tindaklanjuti dari SKPD, atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI," jelasnya.

JM meminta kedepannya, kepada Inspektori Kota Bogor agar bisa meningkatkan supervisi dan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan di masing-masing SKPD.

"Kami akan mendukung penuh pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) jika inspektori membutuhkannya. Jika SDM dirasa kurang, DPRD akan mendukung pengadaan SDM guna memaksimalkan tupoksi inspektori ke depannya," pungkasnya. ● gio

Sistem Pelayan Perizinan Melalui OSS RBA



Sekdakab Bogor, Burhanudin pada Rapat Koordinasi OSS RBAz.

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bogor Burhanudin mengatakan, dengan sistem pelayanan perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) bisa dilakukan pengawasan perizinan di satu koordinasi.

Hal ini dikatakannya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pembinaan, di Gedung Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (19/7).

Pemkab Bogor, tegas Burhanudin, sangat mendukung dan ikut berperan aktif untuk mendukung pemerintah pusat dengan adanya sistem pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

"Saat ini semua pengawasan terhadap pelaku usaha di seluruh Kabupaten Bogor dilakukan dan dikoordinasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1SP). Dengan sistem ini, banyak manfaat dan kemudahan yang pemerintah daerah dapatkan," kata Burhanudin.

Dia menjelaskan, pengawasan pelayanan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Bogor dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi antar instansi di Kabupaten Bogor, sehingga pelaku usaha di Kabupaten Bogor dapat berusaha dengan aman, tenang, nyaman dan maju.

"Sehingga tingkat investasi di Kabupaten Bogor lebih meningkat dan tercapai realisasi yang ditargetkan," harap Burhanudin.

Untuk diketahui, melalui pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA, manfaat dan kemudahan yang didapatkan adalah, tidak tumpang tindih pelaksanaan fungsi pengawasan, terjadi penghematan anggaran dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi.

Burhanudin ingatkan, untuk perizinan harus diperhatikan minimal lima aspek. Pertama, aspek hukumnya, aspek administratifnya, kemudian aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek lingkungan sosial. Ini menjadi rambu-rambu dalam kegiatan pengawasan di lapangan. ● gio

8 | Nusantara



PENERTIBAN ASET PT KAI

Petugas mengeluarkan barang dari dalam rumah saat penertiban aset milik PT KAI di Jalan Laswi, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/7). PT KAI menertibkan tujuh rumah di Jalan Laswi, Bandung sebagai salah satu upaya menjaga aset negara sekaligus melakukan optimalisasi aset.

Bos Rans, Raffi Ahmad Siap Majukan Kabupaten Bogor

Raffi Ahmad menuturkan, bahwa Kabupaten Bogor tak hanya memiliki Stadion Pakansari, tetapi juga punya potensi lainnya, termasuk jumlah masyarakatnya yang mencapai 5,4 juta jiwa. Dengan berkolaborasi, pihaknya bisa ikut berkontribusi positif dan membuat maju Kabupaten Bogor.

CIBINONG (IM)- Bos Rans Nusantara FC maupun Rans Entertainment Raffi Ahmad akan berkolaborasi dengan Pemkab Bogor, mulai dari sepakbola, sport, life style, entertainment, usaha kuliner, UMKM dan lainnya.

Raffi Ahmad yang ditemui wartawan usai beraudiensi dengan Plt Bupati Bogor mengaku dengan berkolaborasi, bisa ikut

berkontribusi positif dan membuat maju Kabupaten Bogor.

"Hari ini, kami beraudiensi dengan Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan jajaran. Semoga dengan berkolaborasi, bisa ikut berkontribusi positif dan membuat maju Kabupaten Bogor," ujar Raffi Ahmad, Rabu (20/7).

Raffi Ahmad menuturkan, bahwa Kabupaten Bogor tak hanya memiliki Stadion Pakansari, tetapi juga punya potensi lainnya, termasuk jumlah masyarakatnya yang mencapai 5,4 juta jiwa.

"Akses jalan menuju Stadion Pakansari sangat mudah dan bagus, juga bisa dikunjungi oleh masyarakat dari daerah sekitar. Insya Allah, Rans Nusantara FC akan berhome

base di Stadion Pakansari," tutur Raffi Ahmad.

Ayah dua orang anak itu berharap, masyarakat Bogor dan daerah sekitar, kedepan bisa memenuhi Stadion Pakansari, untuk menonton Rans Nusantara FC.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menanggapi siap untuk berkolaborasi dengan Rans Nusantara FC maupun Rans Entertainment.

Stadion Pakansari yang bertaraf internasional, paparnya akan mempertandingkan dua klub Liga 1 Indonesia yaitu Persikabo 1973 dan Rans Nusantara FC, di mana keduanya akan bergiliran menjadi tuan rumah.

"Saya senang, masyarakat Bogor memiliki pilihan dalam mendukung klub sepakbola idolanya, yaitu Persikabo 1973 dan Rans Nusantara FC," terang Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Rans Nusantara FC sangat terbuka menampung atau mengontrak pemain sepakbola asal Bogor. Hingga bisa memajukan dunia sepakbola di Bumi Tegar Beriman.

"Rans Nusantara FC sangat terbuka, jika ada pemain sepak bola asal Bogor yang bagus permainannya. Hal itu menjadi pertimbangan kami, memperbolehkan mereka berhome base di Kabupaten Bogor," jelasnya. ● gio

Plt. Bupati Bogor Sampaikan Pentingnya Sinergitas Menjaga Pertahanan Wilayah

BOGOR (IM)- Upaya meningkatkan skill dan kemampuan kepemimpinan dalam menjaga kondusivitas pertahanan wilayah, Pasis Dikreg LXII Seskoad, melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Studi Pertahanan di Kabupaten Bogor tahun 2022 yang selama 1 pekan.

Rombongan Pasis Dikreg LXII Seskoad diterima langsung oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Ruang Rapat I Setda, Selasa (19/7).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, luasnya wilayah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang besar dibutuhkan kekompakan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI dan Polri.

"Tentunya untuk menciptakan kondusifitas wilayah dan mendukung kelancaran pembangunan.

"Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan jajarannya Pasis Dikreg LXII Seskoad, mudah-mudahan melalui KKL ini bisa mendapat

gambaran implementasi mengenai nilai soliditas dan sinergitas antara Forkopimda, TNI dan Polri bersama Pemkab Bogor serta berbagai komponen bangsa lainnya dalam menjaga stabilitas pembangunan nasional," ungkap Plt. Bupati Bogor.

Disebutkan Iwan, berbagai kolaborasi dan kerjasama yang melibatkan TNI, Polri, Korem Suryakencana, Kodim 0621 dan Pangdam III Siliwangi telah dilakukan seperti penanganan bencana, pembangunan Hunian Sementara (Huntara), pembangunan Hunian Tetap (Huntap), dan pembangunan Jembatan Rawayan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

"Semua kegiatan yang melibatkan TNI dan Polri, Alhamdulillah tahun 2021 selesai, kita terus lanjutkan di tahun 2022. Tahun 2021 jembatan rawayan sukses dibangun sebanyak 51 jembatan, di tahun ini akan dibangun 30 jembatan tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Kami juga kerjasama terkait TMMD di Kecamatan

Klapanunggal dan Kecamatan Ciguged," jelas Iwan Setiawan.

Dosen Madya Seskoad, Kolonel Czi Muhammad Said menyatakan bahwa Kabupaten Bogor merupakan barometer dari Kabupaten di seluruh Indonesia. Wilayahnya cukup luas, penduduknya cukup besar, lengkap dari sisi pemerintahan juga sejarahnya. Kabupaten Bogor adalah Kabupaten luar biasa dan sangat strategis.

"Itu salah satu kepercayaan kami memilih Kabupaten Bogor sebagai lokasi KKL para mahasiswa Seskoad. Terima kasih atas sambutan yang meriah dari Plt. Bupati Bogor, Sekda, Dandim 0621 dan Kapolres Bogor beserta jajaran. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi para mahasiswa kami dalam melaksanakan tugas kedepan," urai Muhammad Said.

Turut Hadir menyambut Pasis Dikreg LXII Seskoad yakni, Dandim 0621, Kapolres Bogor, Para Asisten dan Kabag lingkup Setda Kabupaten Bogor. ● gio

Pemkab Bogor Ikut Kegiatan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2022

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ikut serta dalam kegiatan Apkasi Otonomi Expo tahun 2022 selama tiga hari 20-21 Juli 2022, di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana promosi beragam produk UMKM Kabupaten Bogor di tingkat nasional, meningkatkan penawaran investasi kepada para buyer dan investor, serta sebagai upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor akibat pandemi Covid-19.

Untuk diketahui tujuan keikutsertaan Pemkab Bogor dalam kegiatan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2022 yakni, untuk mendorong ekonomi daerah dan bangkit melalui promosi komoditi unggulan dan beragam produk UMKM Kabupaten Bogor, meningkatkan penawaran investasi kepada para buyer dan investor serta membangun jejaring dengan stakeholder dalam pembangunan daerah. Juga sebagai upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor akibat pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1SP) Kabupaten Bogor, Zecky Zakaria mengungkapkan, ada 80 pelaku UMKM kolaborasi dengan sejumlah Perangkat Daerah (PD), Kadin, Apindo dan lainnya yang ikut serta dalam kegiatan Apkasi Otonomi Expo tahun 2022, yang dibagi

menjadi 4 stand masing-masing berukuran 36 meter.

"Kegiatan rutin Apkasi Otonomi Expo ini cukup bagus, salah satunya sebagai ajang silaturahmi dengan pimpinan daerah juga ajang berbagi informasi dan mempromosikan potensi yang ada di masing-masing wilayah," ujar Zecky, Selasa (19/7).

Ada lima sektor investasi unggulan di Kabupaten Bogor, yakni sektor perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan dan properti. Lima sektor investasi unggulan yang dipamerkan baik melalui Apkasi Otonomi Expo, LKPN dan pameran lainnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Bogor melonjak tajam secara signifikan.

Bahkan berdasarkan rilis dari BKPM tahun 2021 realisasi investasi mengalami peningkatan dari target 1,2 triliun meningkat menjadi 1,8 triliun. Sementara di tahun 2022 ini realisasi investasi di Kabupaten Bogor sudah mencapai 3,8 triliun.

"Semoga melalui kegiatan ini, selain peningkatan investasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan ekonomi daerah melalui jejaring global pasca Covid-19," ujarnya.

Sekaligus, lebih tegas lagi, dapat memperkenalkan produk UMKM sehingga seluruh masyarakat di Indonesia tahu apa saja segel produk UMKM dimiliki Kabupaten Bogor," tukas Zecky. ● gio

DPRD Dorong Potensi PAD dari Sektor di Luar Pajak Terus Digali

KABUPATEN BANDUNG (IM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berharap Pemerintah Daerah Provinsi Jabar tidak hanya bergantung kepada pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber potensial PAD dari sektor lainnya harus terus digali.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira saat Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Bandung Barat, Senin (18/7) kemarin.

"Ketika PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sudah kesulitan seharusnya pemanfaatan aset bisa menjadi tumpuan utama," ujar Yunandar.

Yunandar menambahkan akibat merembaknya Covid-19,



Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat. R. Yunandar R. Eka Perwira

pendapatan dari sektor pajak sempat mengalami penurunan.

Sehingga menurut Yunandar, sebaiknya potensi-potensi dari berbagai sumber seperti pemanfaatan aset harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal, guna lebih meningkatkan pendapatan PAD.

"Salah satunya bagaimana Bapenda bisa mengelola aset secara produktif untuk mem-

peroleh pendapatan asli daerah," ucap Yunandar.

Yunandar menyebutkan, selama ini pemanfaatan aset sudah berjalan seperti pemanfaatan aset Bapenda menjadi kantin, Gerai ATM dan lainnya.

Ia pun, mendorong agar pemanfaatan aset ini bisa dalam skala yang lebih besar. "Kenapa tidak sekaligus dalam skala yang lebih besar



semisal lahan atau bangunan untuk parkir, itu akan signifikan menjadi penunjang PAD Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menekankan, saat ini sudah saatnya Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) bisa memaksimalkan aset secara produktif.

Hal itu untuk meningkatkan pendapatan daerah diluar pajak kendaraan bermotor, karena potensinya yang besar.

"Potensinya kita ada sekitar 5000 aset Se-Jawa Barat yang bisa kita manfaatkan untuk pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat," pungkaskan Yunandar. ● Iys